

EKSPOSE

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 - 2024



Oleh
H. DENNY SUPDIANA, SE., M.Si
(KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON)

CIREBON, JANUARI 2018

**SISTEMATIKA
PAPARAN**

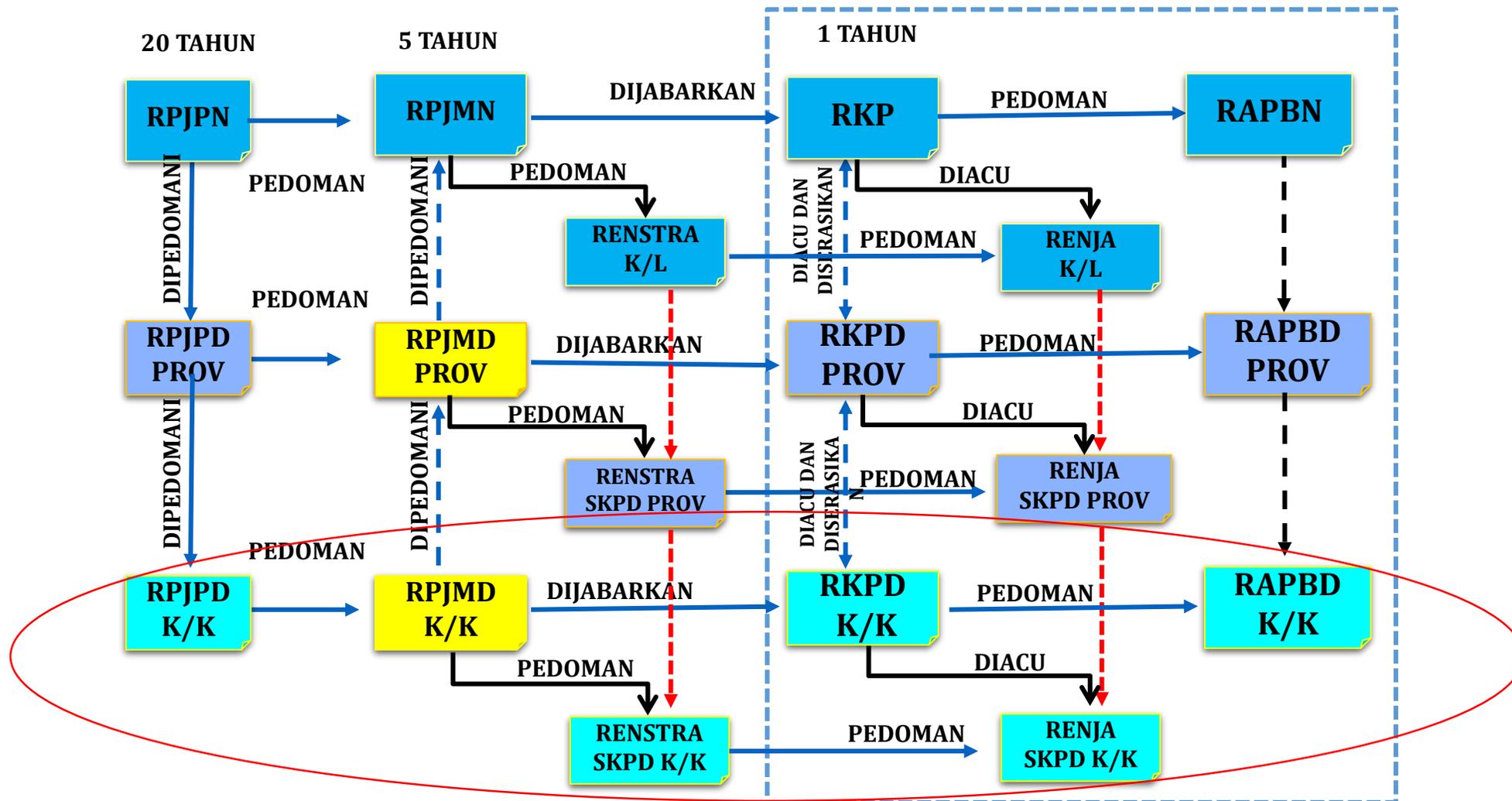


PENDEKATAN TEKNOKRATIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE DAN KERANGKA PENDEKATAN ILMIAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

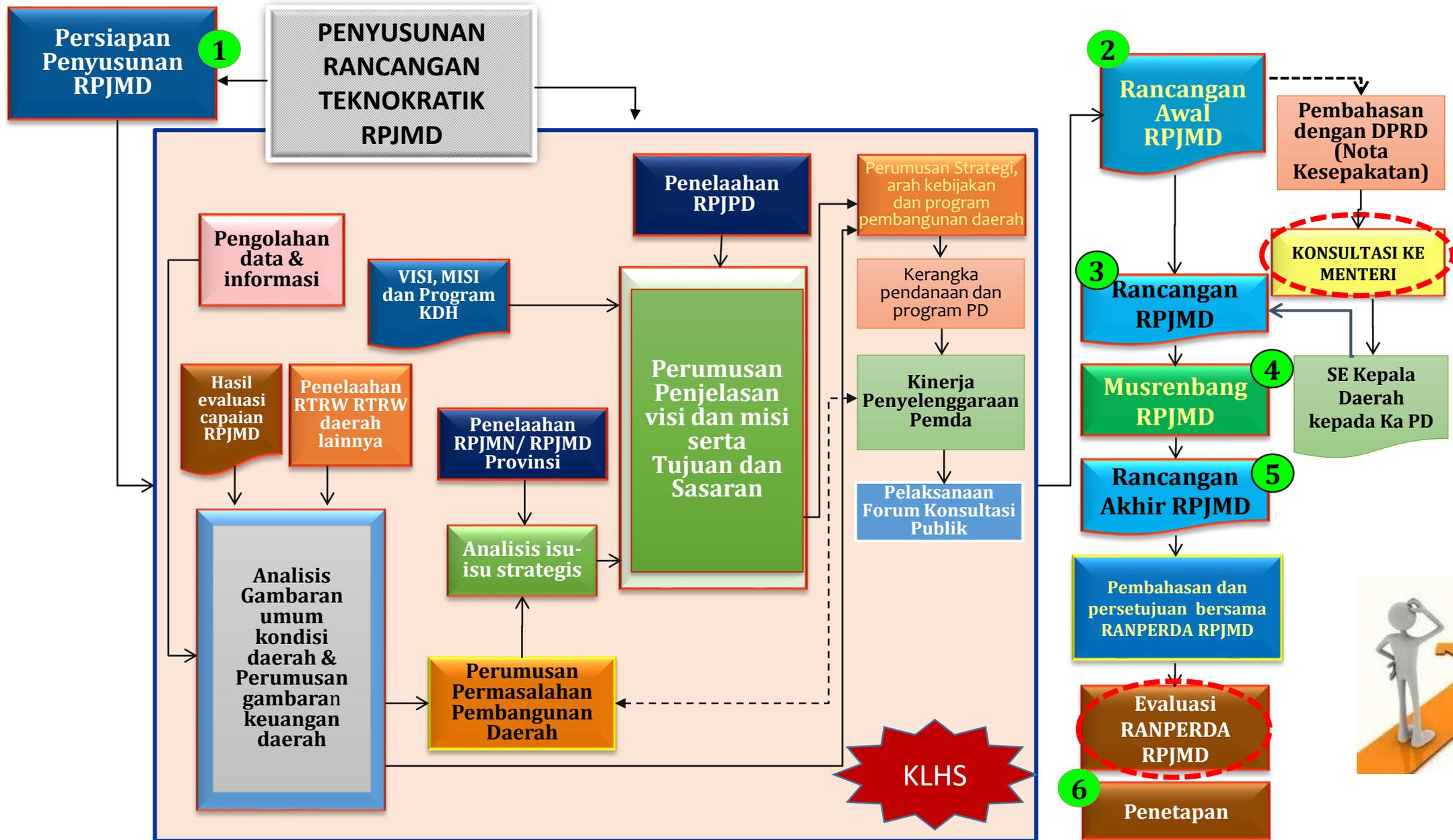
RPJMD MENJADI LANDASAN PENYUSUNAN RKPd DAN RENSTRA YANG DISUSUN OLEH KEPALA SKPD SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DALAM RPJMD KEDALAM KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI KEPALA DAERAH. HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN AMANAT PASAL 263 AYAT (4) DAN PASAL 272 UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

RPJMD MENJADI INSTRUMEN UNTUK MENILAI KEBERHASILAN UNSUR PENYELENGGARA PEMDA DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN. HAL INI MENINGAT KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMDA DINILAI DENGAN CARA MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA DENGAN TARGET KINERJA, PAGU INDIKATIF, YANG DIRENCANAKAN DALAM RPJMD DAN DIJABARKAN LEBIH LANJUT KE DALAM KELOMPOK SASARAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN RENSTRA SKPD

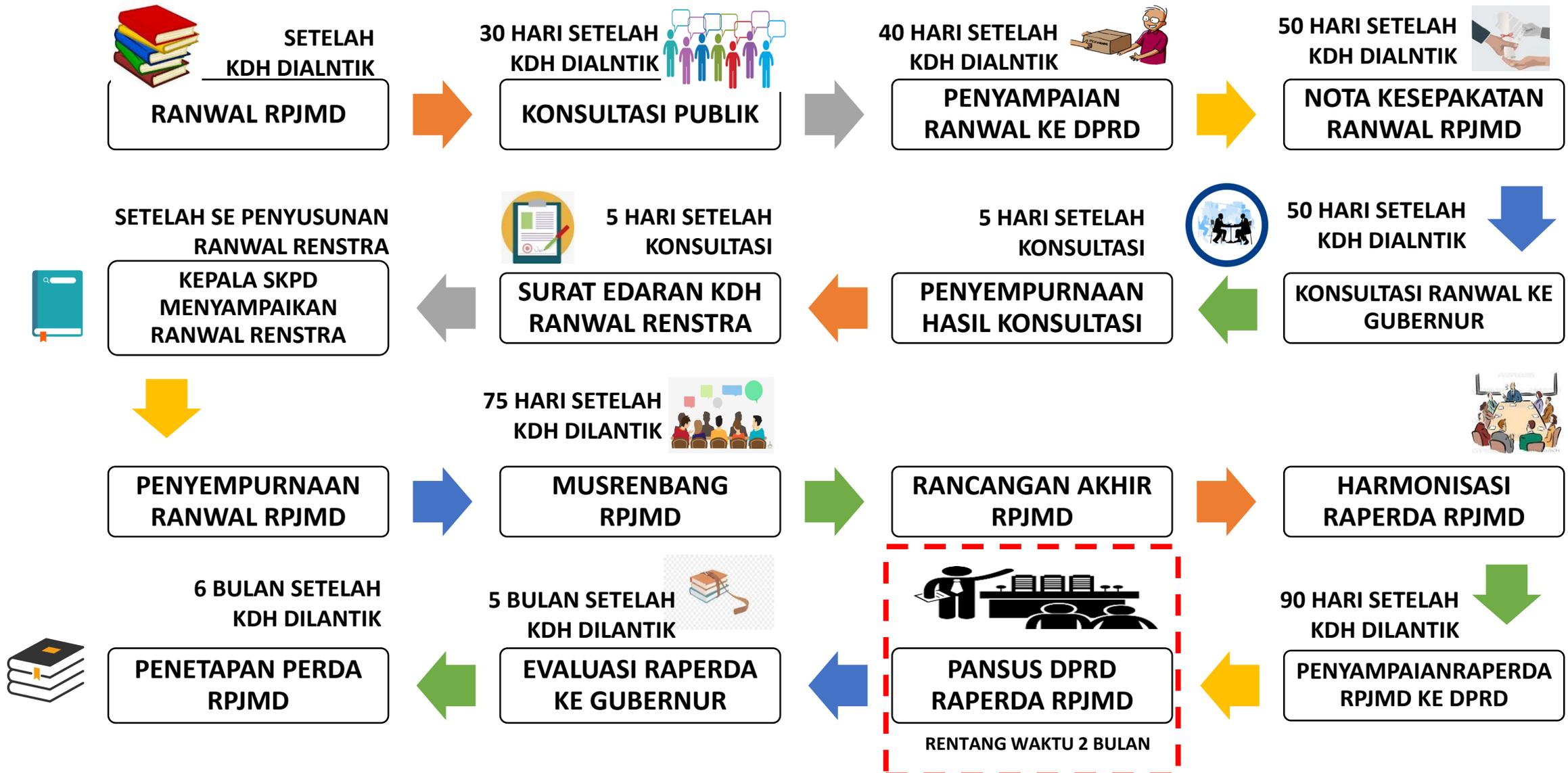
SKEMA RPJMD DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD



JADWAL / TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN CIREBON 2019-2024





(SESUAI PASAL 258 UU NOMOR 23 TAHUN 2014)

DAERAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN DAN PEMERATAAN :

- 1. PENDAPATAN MASYARAKAT;**
- 2. KESEMPATAN KERJA;**
- 3. LAPANGAN BERUSAHA;**
- 4. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK; DAN**
- 5. DAYA SAING DAERAH.**

PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DISERAHKAN KE DAERAH SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL

TINJAUAN RPJPD KABUPATEN CIREBON



RTRW 2018 - 2038

RTRW 2011 - 2031

VISI RPJPD 2005 – 2025 : TERBANGUNNYA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERIMAN DAN PRODUKTIF MENUJU MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON YANG SEJAHTERA

RPJMD 2005-2009

RPJMD 2009-2014

RPJMD 2014-2019

RPJMD 2019-2024

RPJMD 2024-2025



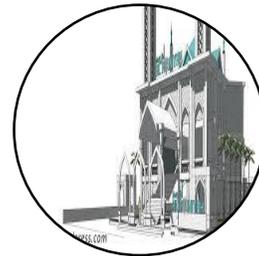
Menata dan
Membangun
Masyarakat yang
Beriman dan Sejahtera

RPJMD TAHAP I



Mewujudkan
Masyarakat Produktif
menuju Masyarakat
Sejahtera

RPJMD TAHAP II



RPJMN 2015-2019
Memantapkan
Pencapaian Masyarakat
yang Sejahtera

RPJMD TAHAP III



RPJMN 2019-2024
Mewujudkan
Tercapainya Masyarakat
yang Sejahtera

RPJMD TAHAP IV



Mempertahankan
Keunggulan
Kesejahteraan
Masyarakat

RPJMD TAHAP V

KONDISI MASA LALU

KONDISI SAAT
INI

KONDISI MASA DEPAN

CAPAIAN KINERJA SASARAN MAKRO KABUPATEN CIREBON 2013 → 2017*



REALISASI	2013	2017
Kabupaten	4,96 %	5,05 %
Provinsi	5,07 %	5,65 %
Nasional		5,27 %



Kabupaten		
Provinsi	9,15 %	2,39 %
Nasional	8,38 %	1,94 %



Kabupaten	14,88 %	8,80 %
Provinsi	9,22 %	8,16 %
Nasional	6,17 %	5,13 %



REALISASI	2013	2017
Kabupaten	14,68 %	12,97 %
Provinsi	9,61 %	7,45 %
Nasional	11,47 %	13,20 %



Kabupaten	65,06	67,07
Provinsi	68,25	70,69
Nasional	68,31	70,81



Kabupaten	0,32	0,35
Provinsi	0,41	0,40
Nasional	0,40	0,38

TINJAUAN RPJPD TAHAP KE-IV (2019-2024)

PADA TAHAPAN INI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Misi Pertama

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Misi Kedua

MENINGKATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI

Misi Ketiga

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG KUAT

Misi Keempat

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH (RTRW 2018-2038)



PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN TERPADU



PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, AGROINDUSTRI, INDUSTRI KECIL DAN MIKRO SESUAI DENGAN POTENSI ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



PENGEMBANGAN WISATA AGRO DAN WISATA RELIGI DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI ALAM DAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BUDAYA



PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN BERSINERGIS DIDUKUNG PRASARANA WILAYAH DAN KAWASAN BUDIDAYA SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN



PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM



PENDISTRIBUSIAN PENDUDUK SESUAI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN



PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PROYEKSI APBD KABUPATEN CIREBON DAN KERANGKA PENDANAAN (dalam jutaan)

NO.	URAIAN	DATA TAHUN DASAR	PERT UMB UHAN	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	PENDAPATAN	3.448.191		3.758.229	4.204.380	4.859.844	5.837.930	7.314.085
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	539.036		565.738	594.930	626.871	661.843	700.166
1.1.1	PAJAK DAERAH	183.717	11,14	204.186	226.935	252.219	280.319	311.551
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	35.262	5,05	37.043	38.914	40.879	42.944	45.112
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.088	(8,33)	5.581	5.116	4.690	4.300	3.942
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	313.969	1,58	318.928	323.966	329.083	334.281	339.561
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.046.907		2.313.806	2.713.773	3.319.731	4.244.681	5.663.729
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL BUKAN PAJAK	107.258	1,09	108.424	109.602	110.793	111.996	113.213
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.500.539	1,62	1.524.917	1.549.690	1.574.867	1.600.452	1.626.453
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	439.111	54,96	680.466	1.054.481	1.634.072	2.532.232	3.924.063
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	862.248		878.686	895.676	913.242	931.405	950.190
1.3.1	HIBAH	107.540	0,00	107.540	107.540	107.540	107.540	107.540
1.3.2	DANA DARURAT	0	0,00	0	0	0	0	0
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA **)	241.351	4,40	251.971	263.058	274.634	286.718	299.335
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS***)	399.514	1,47	405.368	411.308	417.336	423.452	429.657
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	113.844	(0,03)	113.807	113.770	113.733	113.696	113.659

NO.	URAIAN	DATA TAHUN DASAR	PERTUMBUHAN	2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.	BELANJA	3.784.113		4.445.542	5.357.505	6.661.274	8.586.024	11.504.274
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.005.960		2.498.442	3.224.342	4.323.077	6.021.748	8.690.558
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.389.362	10,15	1.530.337	1.685.615	1.856.649	2.045.037	2.252.540
2.1.2	BELANJA BUNGA	0	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0	0,00	0	0	0	0	0
2.1.4	BELANJA HIBAH	53.720	13,04	60.728	68.649	77.604	87.726	99.169
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.678	(44,81)	926	511	282	156	86
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL	19.273	9,20	21.045	22.981	25.095	27.403	29.923
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	541.927	63,38	885.406	1.446.586	2.363.448	3.861.426	6.308.839
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0,00	0	0	0	0	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.778.153		1.947.101	2.133.163	2.338.197	2.564.277	2.813.717
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	263.146	14,73	301.901	346.364	397.374	455.898	523.040
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	911.782	9,57	999.048	1.094.666	1.199.436	1.314.233	1.440.018
2.2.3	BELANJA MODAL	603.225	7,12	646.151	692.133	741.387	794.146	850.659
3.	PEMBIAYAAN	129.934		151.391	177.134	207.869	244.444	287.868
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	124.134	18,15	146.662	173.279	204.727	241.881	285.779
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.800	(18,47)	4.728	3.855	3.143	2.562	2.089

ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MERUPAKAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

(Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017)

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Karakteristik lokasi dan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah rawan Bencana

Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan sosial

Seni Budaya dan Olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan Dasar

Pelayanan Penunjang

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

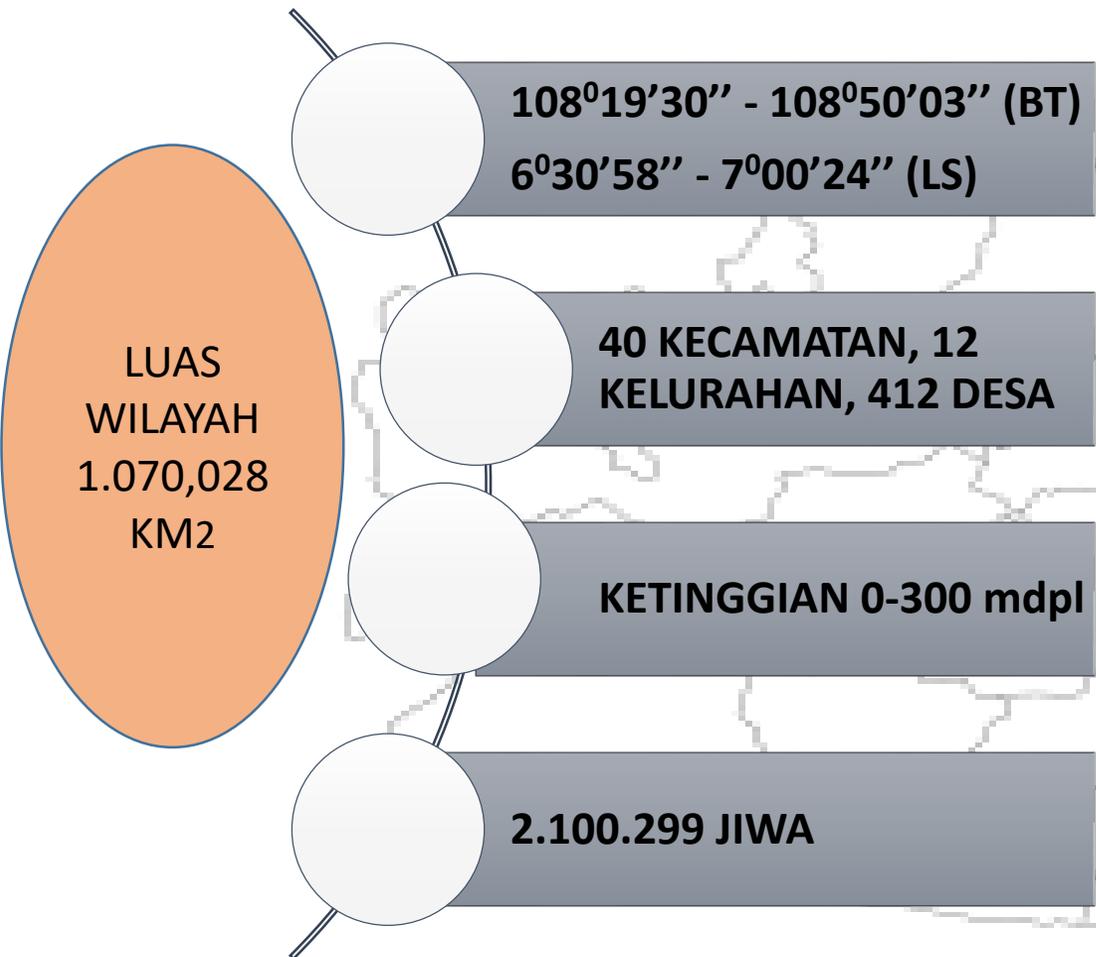
Iklm Berinvestasi

Sumber Daya Manusia

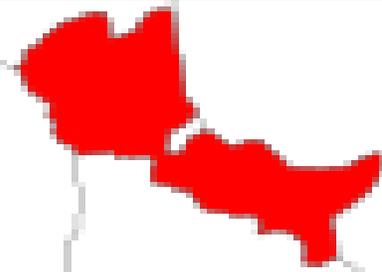


KONDISI EKSTING KAB.CIREBON

KONDISI EKONOMI-WILAYAH, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA



INDEKS PENDIDIKAN	: 55,73 POIN
INDEKS KESEHATAN	: 79,20 POIN
INDEKS DAYA BELI	: 68,36 POIN
RLS	: 6,5
HLS	: 12,27
AHH	: 71,48



PDRB PERKAPITA	: 19.424.050 (adbh)
TINGKAT KESEMPATAN KERJA	: 90,7 %
KEMANTAPAN JALAN	: 348,17
RASIO ELEKTRIFIKASI	: 100 %
KAWASAN LINDUNG	:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017* DAN TARGET 2019/2020



PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Target	4,76 %
Realisasi	4,70 %



INFLASI (%)

Target	3,9 %
Realisasi	3,9 %



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Target	9,18 %
Realisasi	9,21 %



KEMISKINAN (%)

Target	9,46 %
Realisasi	12,97 %



IPM (Poin)

Target	68,84	POIN
Realisasi	67,07	POIN



INDEKS GINI (Poin)

Target	0,33	POINT
Realisasi	0,35	POIN

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN YANG MASIH CUKUP TINGGI
- BELUM OPTIMALNYA PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN SOSIAL

KETAHANAN PANGAN

- KURANGNYA DIVERSIFIKASI PANGAN
- SEMAKIN BERKURANGNYA AREA LAHAN TANAMAN PANGAN KARENA BANYAKNYA ALIH FUNGSI LAHAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- MASALAH PENANGANAN SAMPAH PERLU MENDAPAT PERHATIAN YANG SERIUS
- TERJADINYA DEGRADASI LAHAN PERTANIAN YANG SANGAT BERKAITAN DENGAN FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN YANG SANGAT CEPAT

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

- KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON MASIH TINGGI KARENA TERDAPAT PENINGKATAN KETIMPANGAN ATAU KETIDAKMERATAAN PENGELUARAN ANTAR PENDUDUK YANG DITUNJUKKAN DENGAN TINGGINYA RASIO GINI MESKIPUN MASIH BERADA PADA TARAF TINGKAT KETIMPANGAN RENDAH (KARENA GR < 0,4).

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- PENYEDIAAN JALAN KONEKTIVITAS SUDAH BAIK, NAMUN MASIH MEMBUTUHKAN BEBERPA PEMBANGUNAN JALAN BARU DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN YANG SUDAH ADA

KESELARASAN VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI

MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL

NILAI

BERBUDAYA

SEJAHTERA

AGAMIS

MAJU

AMAN

ISU STRATEGIS

1. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT
2. PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN MASALAH SOSIAL
3. PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
4. PENYEDIAAN DAN KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
5. REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK
6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
7. KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

SINERGITAS ISU STRATEGIS TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024



PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON 2019-2024

- 1. PENINGKATAN AKSES, KUALITAS PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN DASAR**
- 2. PERLUASAN JAMINAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAIK BERSIFAT PREVENTIF MAUPUN KURATIF BERBASIS MASYARAKAT**
- 3. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK PENINGKATAN LAYANAN DASAR, KELANCARAN KEGIATAN EKONOMI, DAERAH PERBATASAN DAN RAWAN BENCANA**
- 4. PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATAYANG BERBASIS INOVASI**
- 5. PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL**
- 6. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DAN PENGUATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN**
- 7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG GUNA MENDUKUNG SINERGITAS WILAYAH DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN**
- 8. REFORMASI BIROKRASI MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**
- 9. PENINGKATAN KONDUSIFITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DALAM INTERAKSI SOSIAL DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**



BUDAYA



WISATA



EKONOMI-DIGITAL



LAP. KERJA



LINGKUNGAN



PENATAAN RUANG



INFRASTRUKTUR



PELAYANAN PUBLIK



PENDIDIKAN



KESEHATAN



PUSAT KEAGAMAAN



KONDUSIF

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 - 2024



MATRIKS INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN NILA-NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT	MELESTARIKAN DAN MENUMBUH KEMBANGKAN BUDAYA MASYARAKAT	MENINGKATNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MASYARAKAT	(%) BUDAYA DAERAH YANG DILESTARIKAN		
			JUMLAH KARYA SENI DAN BUDAYA YANG DIDAFTARKAN UNTUK MEMPEROLEH HKI	OPTIMALISASI, PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA LOKAL YANG STRATEGIS UNTUK DIREVITALISASI
			JUMLAH KELOMPOK / KOMUNITAS KEBUDAYAAN YANG AKTIF	PENGUATAN INSTITUSI- INSTITUSI BUDAYA YANG BERAKAR PADA NILAI-NILAI LOKAL	PEMBINAAN, PENDATAAN, REVITALISASI DAN KERJASAMA INSTITUSI BUDAYA LOKAL YANG MASIH AKTIF DAN YANG PERNAH ADA
		PENGURUSUTAMAAN PENGEMBANGAN BUDAYA DALAM PERENCANAAN DAERAH DAN DESA		SINGKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM KABUPATEN DAN DESA DI BIDANG KEBUDAYAAN	
		BERKEMBANGNYA SEKTOR WISATA BERBASIS BUDAYA	JUMLAH WISATA YANG BERBASIS KEBUDAYAAN	FASILITASI DAN PROMOSI KEGIATAN WISATA DENGAN MEMANFAATKAN BUDAYA LOKAL	PENGEMBANGAN PAKET – PAKET WISATA DAN BUDAYA SERTA PENYELENGGARAAN EVENT – EVENT BUDAYA DAN KERJASAMA DALAM PROMOSI WISATA
				PENGEMBANGAN SDM PELAKU WISATA BUDAYA	PENINGKATAN KAPASITAS, PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PELAKU USAHA WISATA BUDAYA

MISI II SEJAHTERA

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA	MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	IPM	PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SDM BIDANG PENDIDIKAN	PERLUASAN JAMINAN AKSES DAN FASILITASI PENDIDIKAN DASAR
			RLS ; HLS		PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF
					PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KELUARGA
					PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG PENDIDIKAN
		MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	AHH	PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN KETERJANGKAUAN CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN	MEMPERLUAS AKSES CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
					PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KUALITAS LAYANAN KESEHATAN
					PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KIE KESEHATAN KELUARGA
					PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN
					PENINGKATAN KAPASITAS SDM BIDANG KESEHATAN
		MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT	INDEKS DAYA BELI / PURCHASE POWER PARITY (PPP)	MENEKAN PENGELUARAN DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN	MEMPERLUAS SUMBER PENDAPATAN ALTERNATIF
					PENINGKATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BARANG DAN SARANA PRASARANA PRODUKSI

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	PROSENTASE PENDUDUK MISKIN DIBAWAH GARIS KEMISKINAN	PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KELOMPOK RENTAN	FASILITASI JAMINAN SOSIAL BAGI WARGA RENTAN
				PENYUSUNAN KEBIJAKAN AFIRMATIF BAGI KELOMPOK RENTAN	PENGUATAN REGULASI PERLINDUNGAN WARGA RENTAN
					PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA BAGI WARGA RENTAN
		MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN	JUMLAH KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN SERAPAN TENAGA KERJA LOKAL	PENGUATAN DUKUNGAN KESEJAHTERAAN DAN PELUANG KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL
			PROSENTASE ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA	PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASAR TENAGA KERJA	PENINGKATAN KUALITAS, PRODUKTIFITAS DAN KOMPETENSI SERTA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA
				MENCETAK WIRAUSAHA BARU BAGI PEMBERDAYAAN POTENSI EKONOMI LOKAL	PENYEDIAAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DAN PEMBINAAN KOMUNITAS PENGEMBANGAN USAHA
				PENGUATAN KELOMPOK DAN PELAKU USAHA DALAM RANGKA MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL YANG MENDUKUNG EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN BUMDes DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
		TINGKAT PENANAMAN MODAL	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI	PERIJINAN SATU ATAP	
				PEMENUHAN INFRASTRUKTUR EKONOMI	
		KEMUDAHAN PERIJINAN INVESTASI YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN	PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN INDUSTRI		

MISI III AGAMIS

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN DAN BERETIKA

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KESHALEHAN SOSIAL DAN KERUKUNAN ANTAR DAN INTER UMAT BERAGAMA	MENURUNNYA KEGIATAN ASUSILA DI MASYARAKAT	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	OPTIMALISASI PENEGAKAN REGULASI KETERTIBAN UMUM DAN KESHALEHAN SOSIAL	PENGUATAN PERAN SERTA PENEGAK PERDA DAN TOKOH MASYARAKAT
			ANGKA PENYAKIT MASYARAKAT		MENINGKATKAN PEMAHAMAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
		MENURUNNYA PERGESEKAN (FRIKSI) ANTAR DAN INTERNAL UMAT BERAGAMA	ANGKA KONFLIK AGAMA		MEMFASILITASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
				PEMENUHAN KEBUTUHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN	PENGUATAN DAN OPTIMALISASI PERAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM RANGKA MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL, SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	LPE, INDEKS GINI, INDEKS WILLIAMSON	MENUMBUHKAN PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN BARU BERBASIS PADA KEGIATAN EKONOMI UNGGULAN	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA EKONOMI LOKAL YANG DAPAT MEMICU PERKEMBANGAN WILAYAH DAN MEMBERIKAN SPIOVER EFFECT PADA AREA SEKITARNYA (HINTERLAND)
			PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI PENGOLAHAN, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA	MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI PRODUKTIF YANG BERDAMPAK POSITIF PADA LINGKUNGAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN	MEMPERPENDEK RANTAI DISTRIBUSI PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN SARANA PRASARANA PRODUKSI
				MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA	MENAMBAH AKSES PASAR RAKYAT
				MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA BERBASIS AGROINDUSTRI	PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
			MEMERATAAN DANA PEMBANGUNAN DITIAP KECAMATAN UNTUK PENINGKATAN KEGIATAN EKONOMI YANG MERATA	MENGOPTIMALKAN DUKUNGAN SEKTOR SWASTA DALAM PEMERATAAN EKONOMI	PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH POTENSI DAERAH YANG BERDAYA SAING
			MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERTUMBUHAN PDRB KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKEADILAN
		PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN			MENYUSUN KEBIJAKAN EKONOMI YANG MEMBERIKAN AFIRMASI TERHADAP UMKM DAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF
		SKOR POLA PANGAN HARAPAN / PPH KONSUMSI (POINT)		PENGEMBANGAN PERTANIAN BERORIENTASI BISNIS (AGRO BISNIS)	PERLINDUNGAN KAWASAN PERTANIAN
					PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, KELAUTAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN
					MENINGKATKAN POTENSI ANGGARAN KERJA PRODUKTIF
					PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI KOMODITAS PERTANIAN
			POLA KONSUMSI DAN KEANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN		

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PENYEDIAAN DAN KEMANTAPAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	PERSENTASE KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, JALAN, JEMBATAN, SUMBER DAYA AIR DAN KECIPTAKARYAAN	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, INFRASTRUKTUR, YANG HANDAL DAN TERINTEGRASI GUNA Mendukung TERCAPAINYA KESEIMBANGAN PEMBANUNAN WILAYAH	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN ANTAR WILAYAH DAN KONEKSIVITAS ANTAR WILAYAH TERUTAMA PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN
		MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN CERDAS SERTA PENGUATAN EKONOMI DESA	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUJUAN MASYARAKAT (IKM)	OPTIMALISASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA	MENINGKATKAN INTENSITAS, PROFESIONALITAS DAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH SERTA PENYEDERHANAAN MEKANISME DAN STANDAR PELAYANAN
			INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	MENINGKATKAN TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH, PEMANFAATAN SERTA EVALUASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	NILAI SAKIP	MENINGKATKAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TERINTEGRASI MULAI DARI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN DAN APARATUR YANG BERORIENTASI PADA HASIL DAN KINERJA	PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG INOVATIF DAN PARTISIPATIF SERTA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL, PENINGKATAN PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
			OPINI BPK TERHADAP LKPD		
		MENINGKATNYA MATURITAS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	PENINGKATAN AKSESIBILITAS, KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN SERTA KEPASTIAN PELAYANAN PUBLIK	PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DAN BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN SMART GOVERNMENT
				PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG CERDAS MELALUI REVITALISASI REFORMASI BIROKRASI	
PENINGKATAN KUALITAS DAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG PARTISIPATIF MELALUI KEMUDAHAN DAN TRANSPARANSI AKSES PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH					

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN	TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN CERDAS SERTA PENGUATAN EKONOMI DESA	MENINGKATNYA KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA	MENINGKATNYA JUMLAH DESA MANDIRI	MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK SERTA MEMPERJELAS KEWENANGAN DESA	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
		MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI DESA / KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH DESA YANG PENETAPAN PERDES APBDes DAN RKPDes NYA TEPAT WAKTU	MENGOPTIMALKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA DARI APBN	MENGSINERGIKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
			PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	MENINGKATKAN KUALITAS SDM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
		MENINGKATKAN KAPASITAS PENDAMPING DESA DAN APARATUR KECAMATAN SELAKU PEMBINA DESA			
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PERSENTASE LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN YANG AKTIF	PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI DESA TERUTAMA BADAN USAHA MILIK DESA	PENDAYAGUNAAN ASET DESA DAN KEUANGAN DESA UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA
					PENGEMBANGAN EKONOMI DESA YANG MENITIKBERATKAN PADA PEMANFAATAN POTENSI DESA, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS; PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA; SERTA KESEJAHTERAAN WARGA
		MENINGKATNYA JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG DITETAPKAN	JUMLAH KAWASAN PERDESAAN YANG DITETAPKAN	PENINGKATAN PERAN DAN SINERGITAS SEMUA STAKEHOLDER DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PELAKU KAWASAN PERDESAAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERDESAAN

MISI v AMAN

MEMELIHARA KEAMANAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIFITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya stabilitas nasional

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		INDEKS KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN		
		MENURUNNYA PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM	ANGKA PELANGGARAN PERDA TIBUM	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG KONPREHENSIF
		MENURUNNYA TINDAK KRIMINALITAS DAN KONFLIK SOSIAL	ANGKA KRIMINALITAS DAN KONFLIK SOSIAL	MENINGKATKAN FASILITASI PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.	PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT SECARA KONPREHENSIF SERTA PENINGKATAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
		PENGURANGAN INDEKS RESIKO BENCANA	INDEKS RISIKO BENCANA	PENCAPAIAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	MENGURANGI RISIKO BENCANA SERTA MENINGKATKAN KETANGGUHAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA

PENUTUP

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024 AKAN DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA JADWAL YANG TELAH DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

RENCANA TINDAK LANJUT

A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- ✓ **Menyempurnakan Matriks dan Cascading Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2019 - 2024**
- ✓ **Menyiapkan Lokus Program dan Kegiatan Tahun 2020 sesuai RKPD untuk dituangkan ke dalam Rencana Kinerja SKPD**
- ✓ **Menyiapkan Pra Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) SKPD**

B. BAPPELITBANGDA KAB. CIREBON

- **Menelaah dan Melakukan Penajaman terhadap Indikator Kinerja Kabupaten yang terdapat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**
- **Menyusun Jadwal dan melaksanakan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD s.d. Penetapan Perda RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**
- **Mempersiapkan Dokumen Kelengkapan Program dan Kegiatan Unggulan dan Prioritas Daerah**